BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana Undang-Undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana Undang-Undang. Apabila tidak disebut didalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana.¹

Sering kali kita temukan pengecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontokan pada rumusan penganiyaan pasal 351 KUHP yang tidak mencantumkan unsur objeknya. Ini merupakan pengecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana, Undang-Undang wajib dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam hal, yang merupakan pengecualian adalah hal keharusan mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana yang dengan objek permasalahan mengenai dengan penganiyaan sebagaimana diatur dalam pasal diatas.²

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. oleh karena itu, sering pula dikatakan politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 2021, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 1-2.

² *Ibid.*

dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminallitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun suda ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun yang kenyataan terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.³

Di indonesia, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok seringkali terjadi, baik berupa penganiayaan ringan sampai dengan penganiayaan berat. Perlu kita ketahui, sejatinya manusia sebagai subjek hukum dan mahluk ciptaan tuhan mendapatkan sebuah perlindungan atas kehidupannya, perlindungan tersebut salah satunya bersumber dari hukum yang merupakan aturan yang mengatur tata hidup masyarakat.⁴

Satjipto raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah meberikan pangayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. akan tetapi saat ini banyak sekali tindakan-tindakan yang melawan hukum yang tentunya menyimpangi daripada perlindungan hukum itu sendiri. Salah satunya bentuk tindak pidana tersebut adalah penganiayaan. Jika kita mendefinisikan terkait dengan penganiayaan, dalam doktrin hukum ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan

³ Jurnal, Aulia Parasdika, Andi Najemi, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 70.

⁴ Adami Chazawi, *Loc Cit.*

sengaja untuk menimbulkan rasa atau luka pada orang lain. Tindakan-tindakan penganiayaan fisik itu dapat berupa menampar, menjambak, atau menendang.⁵

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tindak pidana yang di tunjukan terhadap tubuh manusia. Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dijelaskan arti penganiayaan. Menurut tirtaamidjaja sebagai mana di kutip oleh leden marpaung, penganiayaan ialah “sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.⁶

Menurut leden marpaung, dalam penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP penganiayaan di rumuskan antara lain:

- a. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan pada orang lain.
- b. setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan keadaan badan orang lain.

Implementasi Peraturan Kapolri

Perkara pidana pada prinsipnya menempatkan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon suatu perkara pidana. Pendekatan restorative memang dikenal dengan penyelesaian diluar peradilan pidana yang kerap dipahamkan dengan “damai”

⁵ <https://www.media.justitia.com>. Diakses Tanggal 7 November 2023.

⁶ Jurnal, Aulia Parasdika, Andi Najemi, *Loc Cit*.

dan “kekeluargaan”.dalam konteks keadilan restorative, bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum,

melainkan menemukan model penyelesaian yang lebih esensial,⁷dalam hal ini dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut melalui keadilan restofatif dalam kehidupan masyarakat.

Metode penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice juga dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku siapa saja, penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian yang dilakukan pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh penyidik berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Setelah itu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik dari Polsek menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan proses perkaranya.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat di golongan menjadi 3 (tiga) macam penganiayaan yaitu: penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan selalu dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif justice ini bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban serta menghindari efek negative yang timbul dari system pemidanaan yang ada saat ini. Dengan kata lain dapat di simpulkan bahwa tujuan dari restoratif justice tidak lain tidak bukan, agar tercipta bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Para pihak diasas lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.

Penjelasan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 angka (1) PERKAP No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. “penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap: a). laporan/pengaduan; atau b). menemukan langsung adanya tindak pidana. Dan pasal 13 (1). penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala kepolisian sektor. (2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.⁷

Peraturan kepolisian negara republik indonesia no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 2

- 1) penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di laksanakan pada kegiatan

⁷ PERKAP No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
 - b. penyelidikan atau
 - c. penyidikan
- 2) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh penganmban fungsi pembinaan masyrakat dan samapta polri sesuai dengan tugas dan kewenangnya
 - 3) penyidikan atau penyidikan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan huruf c dilakukan oleh penyidik polri
 - 4) penanganan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan
 - 5) penanganan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pasal 3

- 1) penganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan
 - a. umum dan /atau
 - b. khusus
- 2) persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berlaku untuk penaganan tindak pidana berdasarkan keadilan

restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal peyelidikan atau penyidikan

- 3) persyaratan khusus sebagaimana pada ayat 1 huruf b hanya berlaku pada penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan

Pasal 4 persyaratan umum sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a meliputi

- a. materil dan
- b. formil

pasal 5 persyaratan materil sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi

- a. tidak menimbulkan keresahan dan /atau penolakan dari masyarakat
- b. tidak berdampak konflik sosial
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. tidak bersifat radikallisme dan separatisme
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. bukan tindak pidana terorrisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap orang

Pola penyelesaian perkara dengan model mediasi menjadikan para pihak lebih banyak berperan untuk mengatasi persoalannya sendiri. Sedangkan Pengadilan berperan sebagai fasilitator dan mediator terhadap perkara pidana yang mengandung konflik dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan dapat berupa kesepakatan damai, pemberian ganti rugi kepada korban, dan penghukuman kepada pelaku berupa kerja sosial dan lainnya. Dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pembedanaan tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban agar kembali harmonis. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.

Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana "kerusakan" yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai Restorative Justice, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah "a meeting place for people" guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁸

Dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberitahukan akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, mekanisme lain melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Dalam restorative justice, penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait, dengan ganti kerugian. Perdamaian ini dapat dijadikan dasar untuk penghentian proses penyidikan tindak pidana.

Restorative justice dapat diterapkan pada perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Restorative justice juga dapat diterapkan

⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 87.

pada delik biasa/laporan, sepanjang tidak bersinggungan dengan munculnya perlukaan berat dan hilangnya nyawa.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan korban penganiayaan yakni, saudara Yanto Supriyadi. Mengutarakan kepada penulis bahwa penganiayaan yang di alami oleh korban telah dilaporkan ke polsek ternatae selatan, dan telah di tindak lanjuti oleh pihak yang berwajib (polsek ternate selatan) dan pelaku/terlapor yakni. Bapak Sahril, Bapak Upi, dan bapak Ambril. Telah di mintai keteranganya dan ditahan demi keberlanjutan tahap pemeriksaan, terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisin (polsek ternate selatan) para pelaku meminta dan memohon kepada pihak kepolisian, secara tertulis agar dapat memediasi antara pelaku dan korban penganiayaan, Agar proses hukum tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, dengan syarat ganti kerugian yang di harapkan oleh para pelaku, atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku, yakni ganti kerugian yang bersifat perdata tetapi dimaksudkan atau diberikan pada prosedur pidana dan para pelaku bersedia untuk mengganti kerugian secara perdata atau materil⁹

Beberapa perkara pidana penganiayaan memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah penganiayaan masuk dalam kategori penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Hal ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat dalam beberapa perkara terkadang Penyidik (Kepolisian) tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh korban. Khususnya berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang pelaku penganiayaan, mengingat jika si pelaku dikenakan Pasal 351 (1)

⁹ Hasil wawancara dengan korban, tindak pidana penganiayaan. Bapak Yanto Supriyadi

KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan biasa dimana pelaku harus ditahan, jika pelaku dikenakan Pasal 352 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan ringan sehingga pelaku tidak bisa ditahan. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi. Mediasi dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan.¹⁰

Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas mendorong ingin tahu penulis untuk mengetahui serta meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk Proposal dengan judul **“Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui ganti kerugian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi dalam kasusu penganiayaan?
2. Apakah penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui ganti kerugian dapat menghilangkan penuntutan pidana?

¹⁰Budi Suhariyanto, Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Jurnal Rechts Vinding, Vo. 6 No. 1 April 2017, h.6

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh polsek ternate selatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiyaan melalui ganti kerugian
2. Untuk mengetahui kendala apa yang mempengaruhi upaya dari penyelesaian tindak pidana penganiyaan melalui ganti kerugian

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh calon peneliti adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu hukum pidana penganiyaan
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dari para pihak dalam hal ini kalangan akademik, kalangan penegakan hukum dan masyarakat umum pada umumnya agar dapat meminimalisir serta upaya penegakan hukum tindak pidana penyelesaian penganiyaan atas ganti kerugian di polsek ternate selatan